



Transformasi Pengadaan Melalui Kolaborasi Pelaku Usaha Lokal



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Regulasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Terkait Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal

Pasal 4 : Tujuan Pengadaan

- meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- meningkatkan peran serta **Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;**
- meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- **mendorong pemerataan ekonomi.**

Pasal 5 : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

- menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- **mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;**
- mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan

Pasal 65 : Peran Serta Usaha Kecil

- Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- **Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil.**
- **Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil** tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

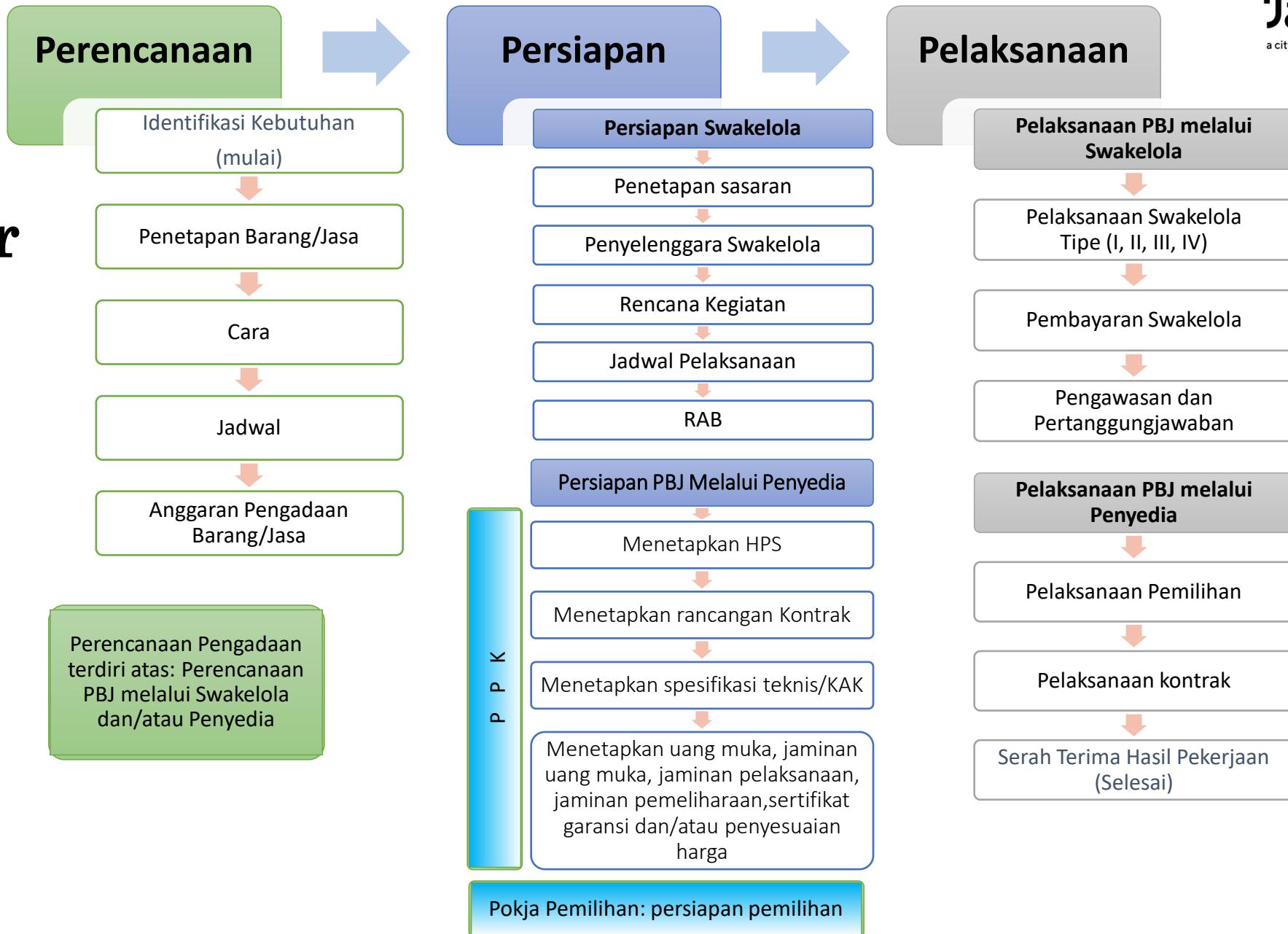
Pelaksanaan Pemilihan



Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan

- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangi pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP

Garis Besar PBJP



Metode Pemilihan B/PK/JL

E-Purchasing

- ❖ Katalog elektronik

Pengadaan Langsung

- ❖ Nilai s.d 200 Juta

Penunjukan
Langsung

- ❖ Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpas utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

Tender Cepat

- ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

Tender

- ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Pengadaan Langsung ♦≤ 100 juta

**Penunjukan
Langsung**

♦Keadaan Tertentu

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

Seleksi

♦> 100 juta

Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK



Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
 Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
 Kuitansi	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
 Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
 Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
 Surat pesanan	<i>e-purchasing/pembelian melalui toko daring</i>			

Peraturan LKPP RI No. 9/2018

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan :

- Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
- PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung.

Pembinaan UMKM DKI Jakarta



Pergub No 2 /2020 Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan Pergub No. 50 Tahun 2019 Pedoman PBJ BUMD

Pasal 30

- (1) Seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Dunia Usaha yang berada di Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penggunaan produk hasil Peserta PKT dalam setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Penggunaan produk hasil Peserta PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

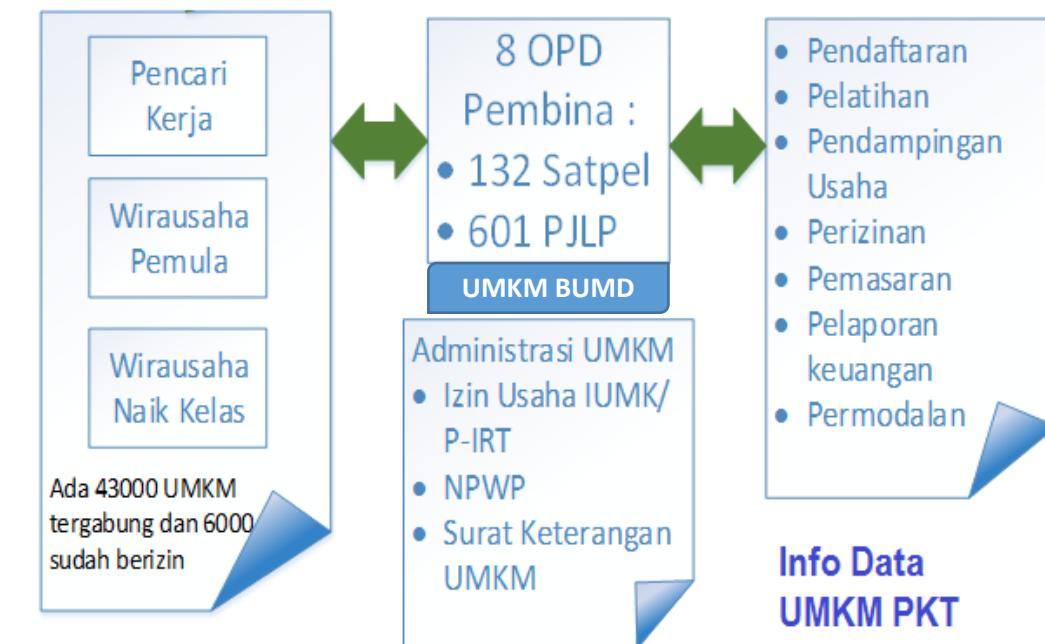
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

Regulasi Pergub Prov. DKI Jakarta No 102 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pembinaan UMKM Prov DKI Jakarta

Pasal 24

1. Seluruh Perangkat Daerah dan Dunia usaha yang berada di daerah memprioritaskan penggunaan hasil peserta PKT untuk setiap kegiatan kerja yang dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing
2. Penggunaan Produk hasil Pesrta PKT pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

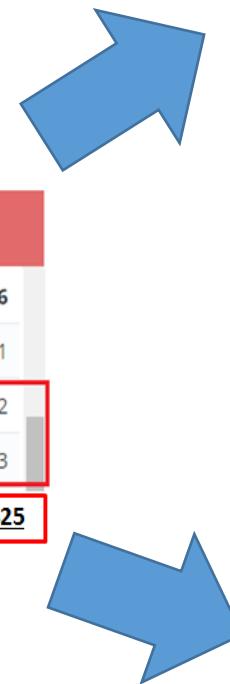


Data APBD

TA 2019

Kode Uraian	Jumlah (Rp)
5.2 BELANJA LANGSUNG	46.389.279.327.726
5.2.1 BELANJA PEGAWAI	3.477.161.253.401
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	24.385.797.935.752
5.2.3 BELANJA MODAL	18.526.320.138.573
	42.912.118.074.325

Sumber : <https://apbd.jakarta.go.id/main>

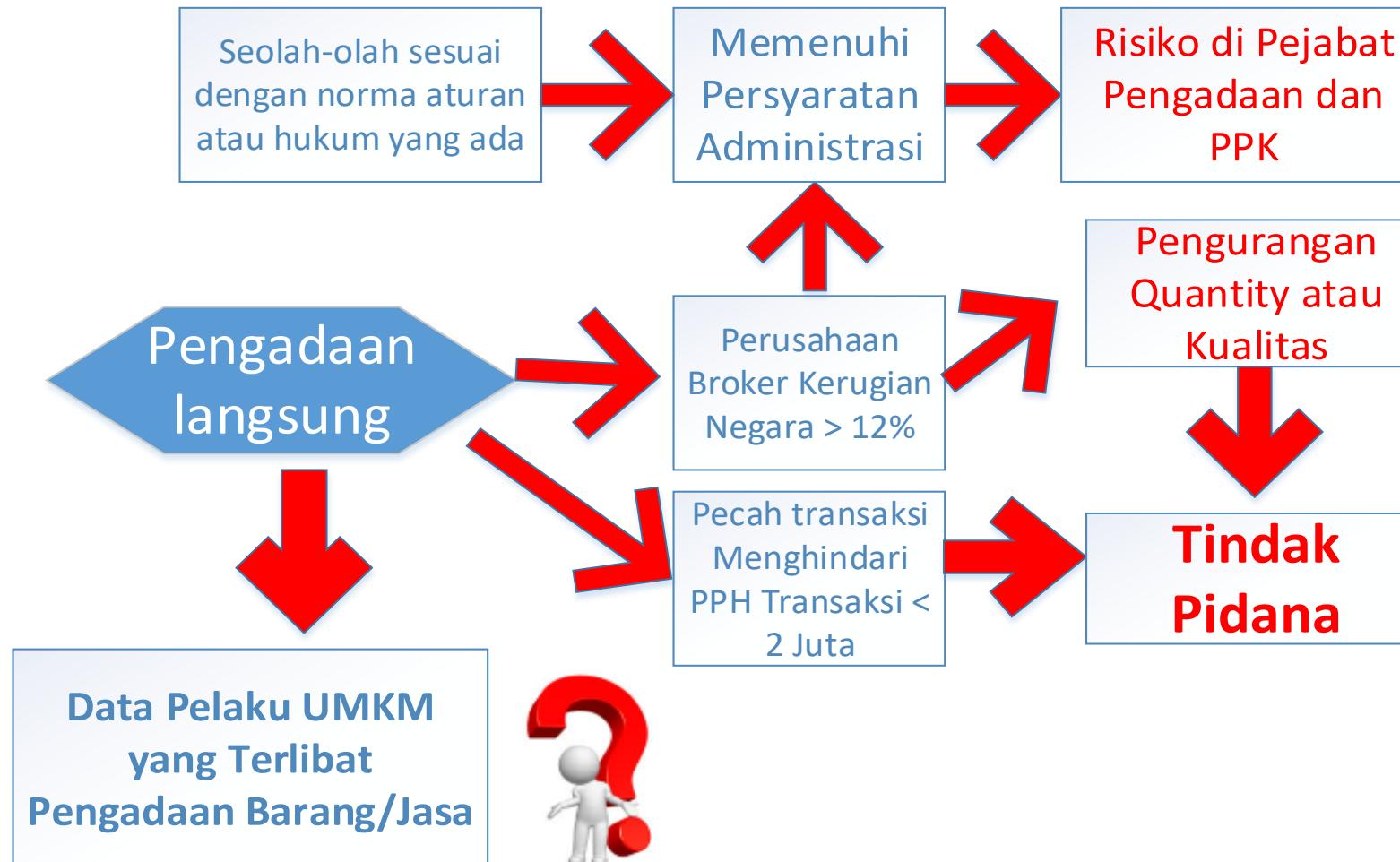


E-Budgeting 2019		
No	Nama Rekening	Total
1	Makan & Minum	1,168,571,406,069
2	ATK	578,313,450,112
3	Pakaian	206,697,217,335
4	Perkakas	201,559,083,082
5	Alat Kebersihan	86,532,054,568
6	Pemeliharaan Printer & Komputer	49,981,773,687
7	Alat Listrik	57,209,172,629

Kategori Sirup Pengadaan Langsung Terbesar

NO	PEMAKETAN SIRUP	PAGU 2018	PAGU 2019
1	Makan minum dan konsumsi	343,187,195,064.00	844,036,092,017.00
2	Alat tulis/ATK	53,319,627,876.00	100,980,120,621.00
3	Pakaian	61,669,739,285.00	76,205,273,660.00
4	Perkakas	59,170,520,447.00	69,034,206,097.00
5	Alat Kebersihan	37,692,236,758.00	32,972,481,560.00
6	Pemeliharaan Printer & Komputer	13,803,787,832.00	14,942,741,359.00
7	Alat listrik	7,612,885,917.00	11,134,918,853.00
8	Souvenir	5,275,880,316.00	9,273,462,220.00
9	Material	5,706,842,300.00	7,985,316,876.00
10	Pemeliharaan AC	6,460,708,665.00	4,555,652,948.00
11	Bahan pangan	3,966,936,842.00	3,810,784,245.00
	JUMLAH	597,866,361,302.00	1,174,931,050,456.00

Pelaksanaan Pengadaan Langsung (e-order) Melalui UMKM Binaan Provinsi DKI Jakarta



Latar Belakang

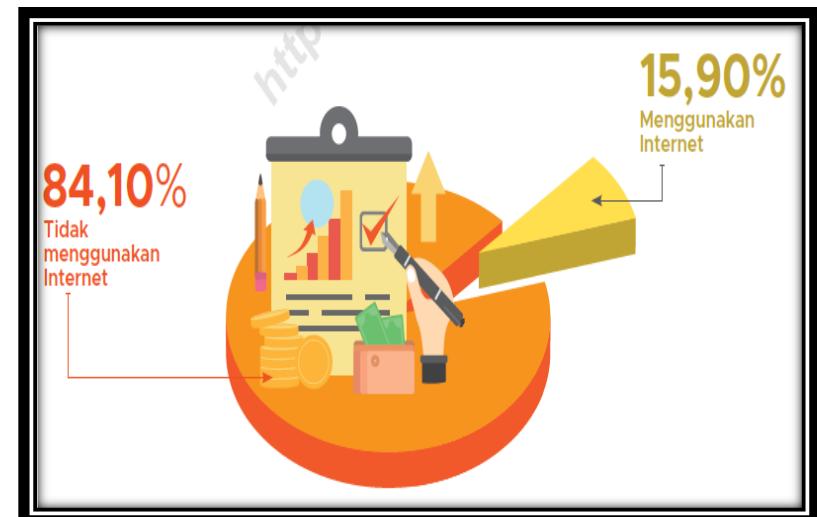
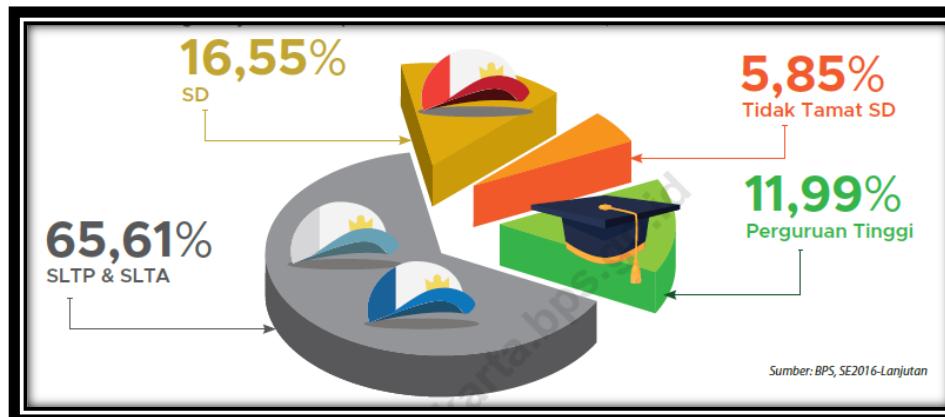
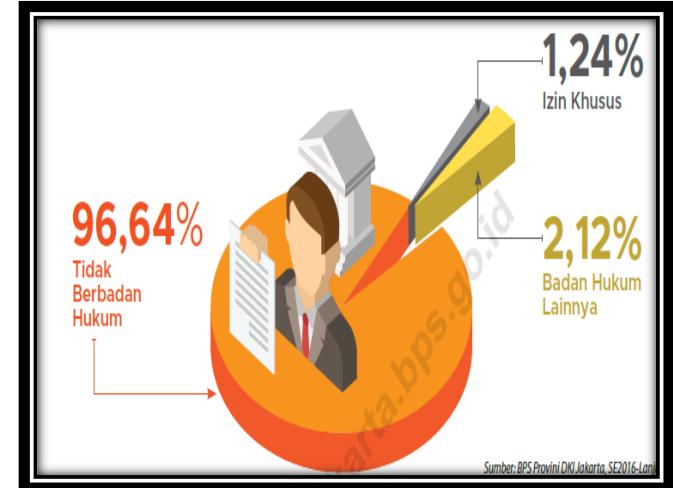
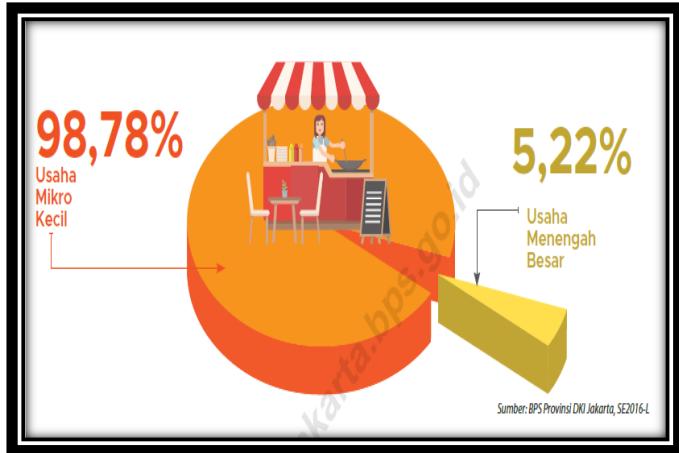


Fraud



Tantangan Pengembangan UMK

Jakarta
a city of collaboration

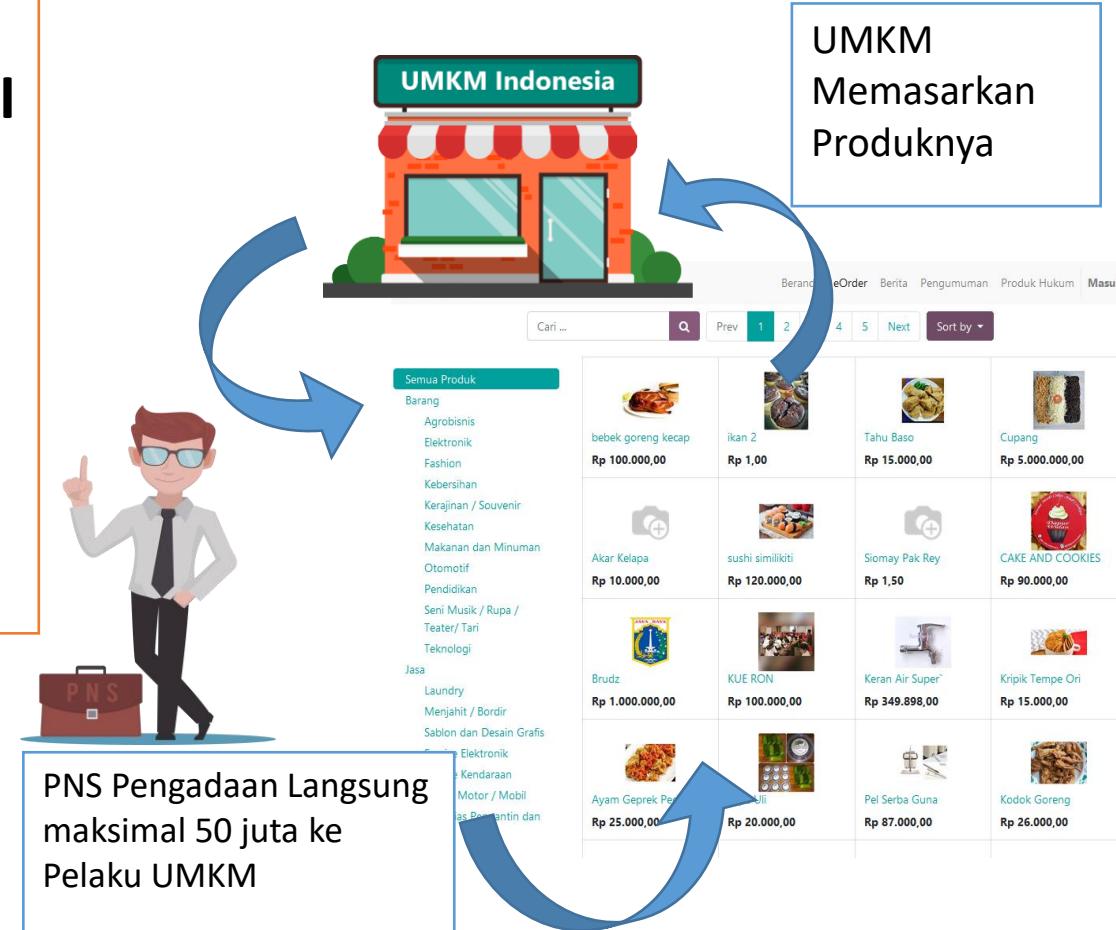


Sumber : jakarta.bps.go.id

Apa Itu e-order BPPBJ

E-order adalah Pasar Onlinenya UMKM Provinsi DKI Jakarta

- UMKM mendapat akses untuk Mempromosikan Produk Barang/Jasanya
- SKPD/UKPD dapat memesan barang/jasa langsung ke UMKM
- Menciptakan Peluang usaha



Implementasi Pajak di e-order

NPWP dan Surat Keterangan UMKM

Punya NPWP SAJA

	Jasa	BBM	Barang
PPH 22			
< 2 juta			Tidak Dipungut
> 2 Juta			1,5%
PPH 23	2%		
PPN			
< 1 juta			
> 1 Juta			

Tidak Punya NPWP

	Jasa	BBM	Barang
PPH 22			
< 2 juta			Tidak Dipungut
> 2 Juta			3,0%
PPH 23	4%		
PPN			
< 1 juta			
> 1 Juta			

Punya NPWP dan PKP

Punya NPWP

	Jasa	BBM	Barang
PPH 22			
< 2 juta			Tidak Dipungut
> 2 Juta			1,5%
PPH 23	2%		
PPN			
< 1 juta			Tidak Dipungut
> 1 Juta			10%

Punya Surat Keterangan UMKM

Punya NPWP saja

	Jasa	BBM	Barang
PPH 22			
< 2 juta			
≥ 2 Juta			
PPH 23			
PPH 4 (2)			0,50%
PPN			
< 1 juta			
>1 Juta			



Problem Solving

Punya Surat Keterangan UMKM

Punya NPWP dan PKP

	Jasa	BBM	Barang
PPH 22			
< 2 juta			
≥ 2 Juta			
PPH 23			
PPH 4 (2)			0,50%
PPN			
< 1 juta			Tidak Dipungut
>1 Juta			10%



Template Invoice dan Kwitansi

Dapoer Ungu

KWITANSI
No. DU0003

Sudah Terima Dari	:	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Nilai	:	Rp 1.920.000,00
Terbilang	:	Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	:	Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
Bank	:	DKI
No. Rekening	:	51323149144
a/n	:	DAHLIA

Jakarta, 02 Agustus 2019


DAHLIA
DAPOER UNGU

Jumlah Rp 1.920.000,00
 No. NPWP: 983802703005000

Dapoer Ungu

DU

INVOICE

No.	:	PO00038
Tanggal	:	01 Agustus 2019
Hal	:	Invoice Makan dan Snack Sosialisasi dan publikasi peraturan pengadaan Barang/Jasa
Tagihan Untuk	:	Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa
Alamat Pengiriman	:	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA, Jl.Kebon Sirih No.18 Lt.20, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Provinsi Indonesia, 10110

Invoice
 Pembayaran sejumlah Rp. 1.920.000,00
 Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Rincian

No.	Uraian Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	NASI BOX PAKET C + Seafood	30.0 Unit	47.000,00	1.410.000,00
	SNACK BOX	30.0 Unit	17.000,00	510.000,00
			Total	1.920.000,00

Rincian Pajak

Produk	PPN (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	PPh 4(2) (Rp)
NASI BOX PAKET C + Seafood	0,00	0,00	28.200,00	0,00
SNACK BOX	0,00	0,00	10.200,00	0,00

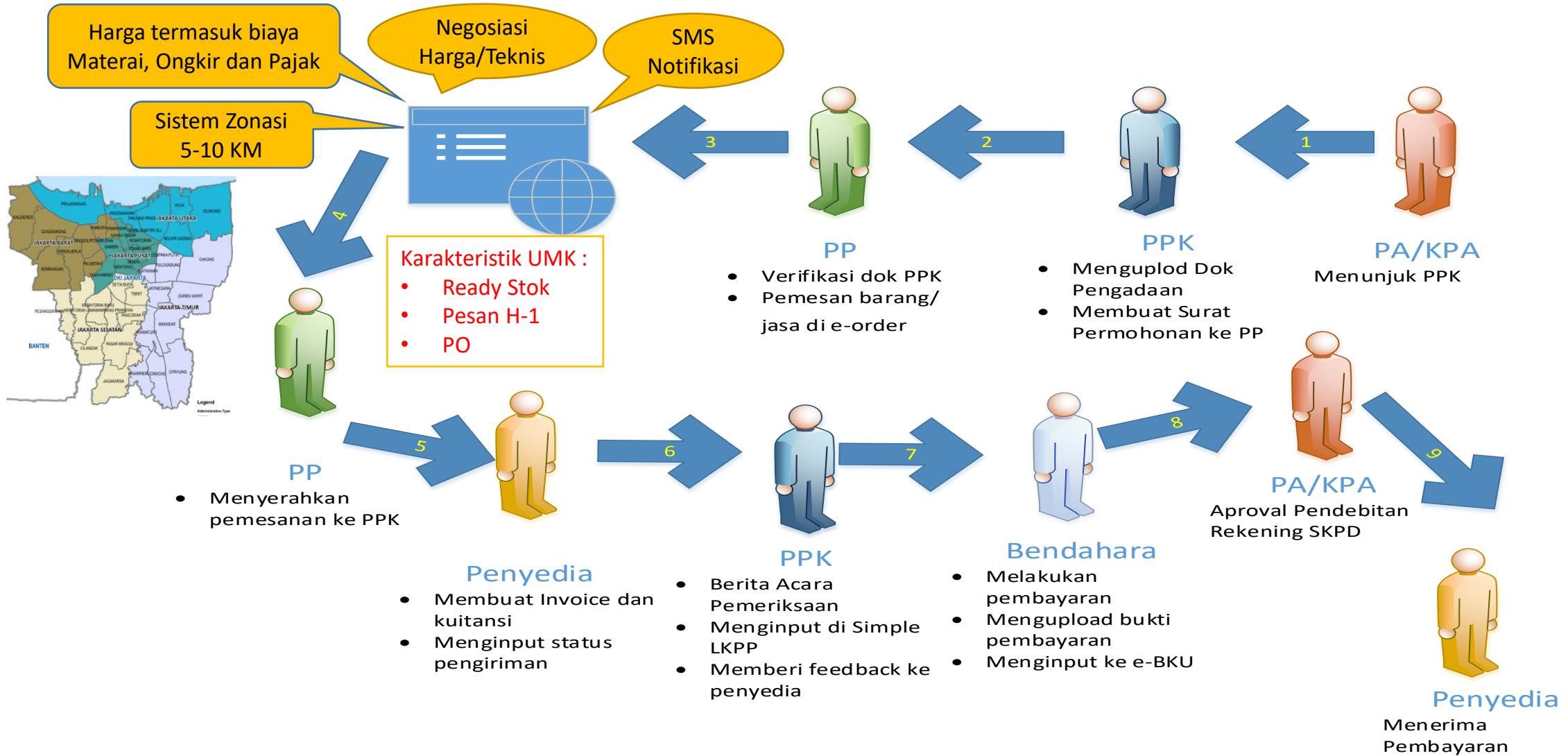
Hormat kami,


DAHLIA
DAPOER UNGU

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke:
 Bank : DKI
 No. Rekening : 51323149144

Penarikan Pajak

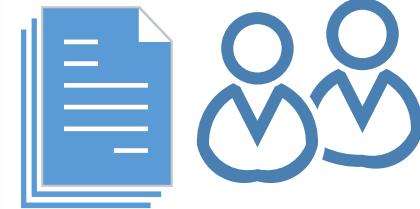
Proses Transaksi Pemesanan Barang/Jasa



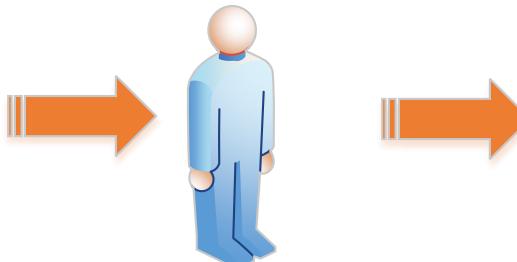
Payment Gateway e-order

Percepatan
Pembayaran
ke UMKM

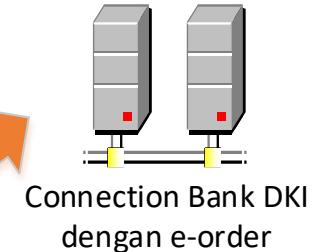
PPK dan Bendahara
menggunakan
template yang ada
di sistem e-order



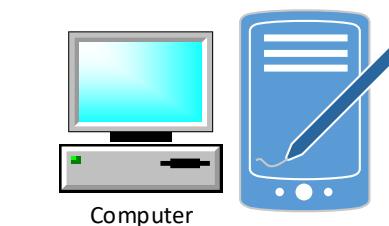
Bendahara memproses
pembayaran
menggunakan PC atau
Handhone



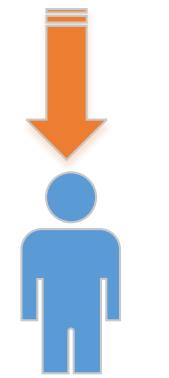
PA/KPA
Persetujuan Bayar
menggunakan PC
atau Handhone



Pembayaran lebih 3 Hari
SKPD akan dipanggil
permasalahan lamanya
pembayaran



Pelaku UMK
mendapat
Pembayaran



Strategi Penguatan Pemberdayaan UMK

Strategi 1 : Penguatan Regulasi

- Instruksi Gubernur No. 48 Tahun 2020 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung dengan Usaha Mikro Kecil (Melalui Sistem e-order)



Strategi 2 : Anggaran Pengadaan B/J

- Perbanyak anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk Usaha Mikro Kecil melalui e-order



TA 2020 SKPD Prov. DKI Jakarta ditargetkan per triwulan menggunakan UMK di e-order untuk Kinerja eselon II pada kegiatan makan/minum, jika tidak mencapai target Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) eselon II akan berkurang.

Dokumen Administrasi

Disimpan di e-order

KAK, DPA dan HPS dan Riwayat HPS (>10 Juta)

Dokumen Administrasi UMKM

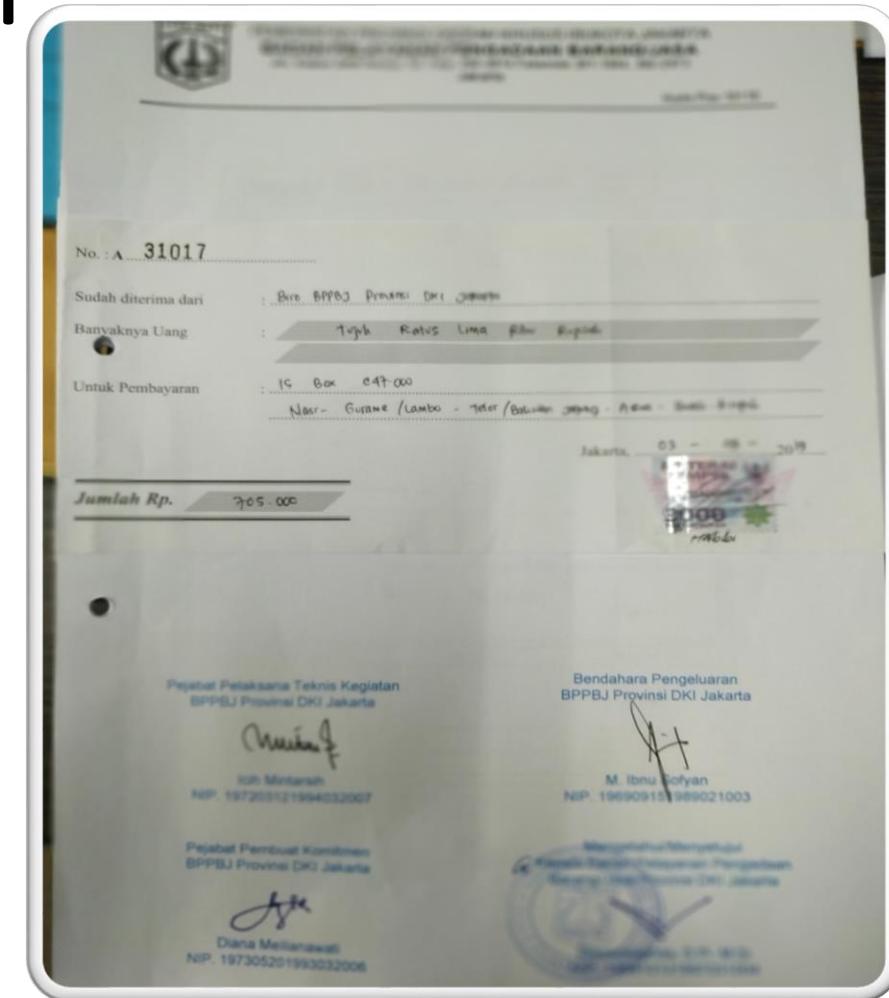
Surat Permohonan Pengadaan dari PA/KPA ke PPK
dan PPK ke Pejabat Pengadaan

Kuitansi, Invoice dan faktur Pajak (untuk PKP)

Berita Acara Pemeriksaan dan BAST

Surat Persetujuan Bayar PA/KPA

Bukti Setor Potongan Pajak



Launching e-order BPPBJ - 6 Januari 2020



anesbaswedan • Following ...
Jakarta, Indonesia

anesbaswedan Dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Prov. DKI Jakarta ...
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan pasar online untuk menaungi UMKM DKI Jakarta yang disebut dengan E-Order.

Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan langsung SKPD/UKPD bahkan BUMD dengan maksimal

60,653 likes 3 DAYS AGO

Add a comment... Post

Transaksi LKPP RI melalui e-order DKI Jakarta



DKI Jakarta Meraih Penghargaan Indonesia Government Procurement Award



e-order Dalam Data

Purchasing s.d. Desember 2020 oleh **19 SKPD/UKPD** kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui e-order BPPBJ dengan nilai Rp. **315 Juta**

UMK bergabung dengan E-order sebanyak total **953 UMK**

Produk Katalog UMK di e-order sebanyak **1653 Produk**

No	SKPD	Total
1	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	3.330.000
2	BIRO KERJASAMA DAERAH	7.005.000
3	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	19.220.000
4	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	450.000
5	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	4.955.000
6	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	26.663.000
7	INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA JAKSEL	3.600.000
8	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.132.000
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	66.083.000
10	SEKRETARIAT DPRD	119.945.000
11	SUKU BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	540.000
12	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA JAKSEL	3.507.500
13	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA JAKTIM	15.600.000
14	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA JAKUT	1.230.000
15	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	6.540.000
16	UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	1.660.000
17	UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	1.950.000
18	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	20.800.000
19	UNIT PENGELOLA METROLOGI	5.452.000
Grand Total		315.662.500

Brosur e-order dan Manual Dan Channel Youtube di website eorder-bppbj.Jakarta.go.id

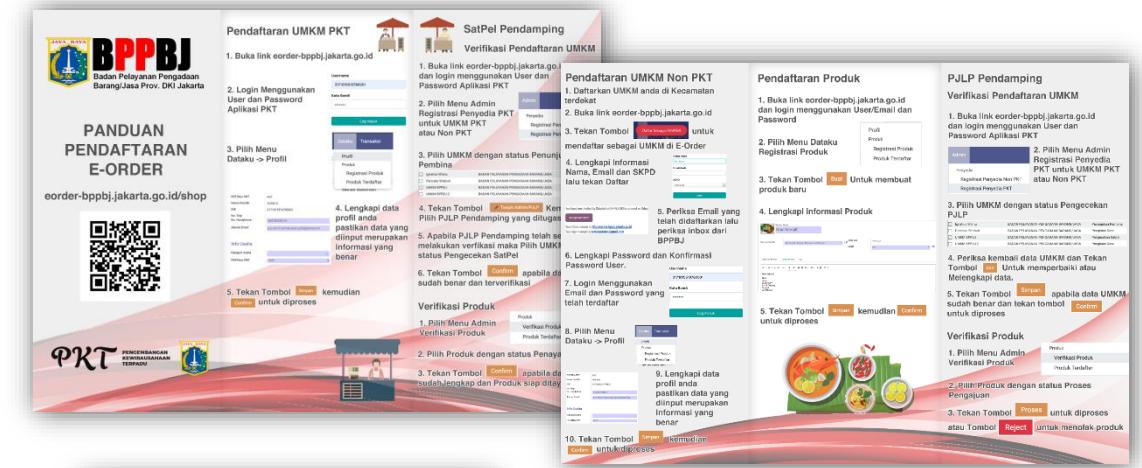
Produk

Cari...

▼ Penyaring ▼ Kelompokkan Menurut ▼ Favorit ▼

1-40 / 232

	SNACK BOX PIPIO Rp 16.500,00 YOSS N.		Lunch box Odessa Rp 25.000,00 ODESSA COOKIES		PAKET AYAM BAKAR DEPAC Rp 25.000,00 DAPUR DEPAC		Nasi Ayam Bakar 76 Tamansari Rp 47.000,00 Waroren Peoli Krems		Nasi Kebuli Klender Kambing (Paket 1) Rp 47.000,00 NASI KEBULI KLENDER
	NASI KEBULI KAMBING Rp 47.000,00 ZAHRA FOOD		Lunch Box D'Lado Paket 1 Rp 47.000,00 D'LADO		Dawet Irieg Rp 15.000,00 BUKIT MENDOREH CATERING SERVICE		Snack Box D'Lado Rp 17.000,00 D'LADO		Kue Lumpur Rp 2.500,00 TOKO PYT
	Surabi Rp 5.000,00 TOKO PYT		Nasi Bakar PYT Rp 25.000,00 TOKO PYT		Paket Nasi Gudeg Rp 35.000,00 Kantin Barokah 354		Snack Box Paket Cantik Premium 1 Rp 18.000,00 Kedai Erini		Snack Box Paket Cantik Premium 2 Rp 18.000,00 Kedai Erini
	Nasi Rendang Rp 35.000,00 Putri Catering		Paket daging saos lada hitam Rp 47.000,00 Putri Catering		Rice Bowl Rp 20.000,00 Endless Catering		Tumpeng Mini Rp 30.000,00 Endless Catering		Snack box Trully Cake Rp 18.000,00 Trully Cake and Bakery
	Nasi Beef Teriyaki Rp 50.000,00 Mak Fau		Nasi Kuning Spesial Rp 47.000,00 Mak Fau		Paket Nasi Rendang Rp 40.000,00 Mak Fau		Jus Kurma Rp 17.000,00 JUS KURMA		Paket Snack Klapetart Rp 18.000,00 warung sundu ik telo
	Nasi Ayam Goreng Rp 25.000,00 warung sundu ik telo		Nasi Ayam Bakar Rp 45.000,00 warung sundu ik telo		Nasi Ayam Teriyaki Rp 45.000,00 warung sundu ik telo		Paket nasi Box ikan Asin Sayur Rp 46.000,00 Dapur Tel Teli		Paket Nasi Box Ayam Penyet Rp 46.000,00 Dapur Tel Teli
	Pecel Lale Habile Rp 47.000,00 PECEL LALE HABILE		Snack box D'MELZ Rp 18.000,00 DAPUR SEMYUN JOGLO		KEBULI KAMBING Rp 47.000,00 NASI KEBULI ABU IBRAHIM		Nasi Box Paket A Rp 47.000,00 PO Lina Catering		PAKET NASI SOTO DAGING/BABAT BETAWI Rp 47.000,00 SOTO BETAWI BU BAEDAH

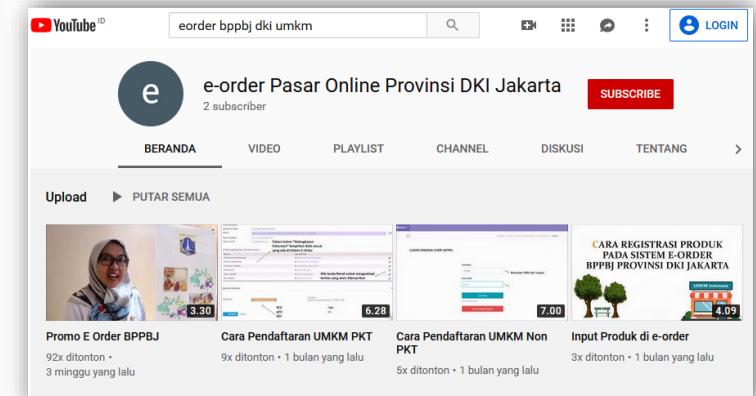


The image displays several screenshots illustrating the e-ordering process and documentation:

- PANDUAN PENDAFTARAN E-ORDER:** A QR code linking to the e-ordering registration guide.
- Pendaftaran UMKM PKT:** Step-by-step guide for registering a PKT-based UMKM.
- SatPel Pendamping Verifikasi Pendaftaran UMKM:** Step-by-step guide for verifying UMKM registrations.
- Pendaftaran UMKM Non PKT:** Step-by-step guide for registering a non-PKT UMKM.
- Pendaftaran Produk:** Step-by-step guide for registering products.
- PJLP Pendamping Verifikasi Pendaftaran UMKM:** Step-by-step guide for verifying UMKM registrations using the PJLP system.

User Manual E-order

Terbit Pada Juli 2019, oleh: Administrator

The image shows the YouTube channel page for "e-order Pasar Online Provinsi DKI Jakarta". The channel has 2 subscribers and several video thumbnails are visible, including:

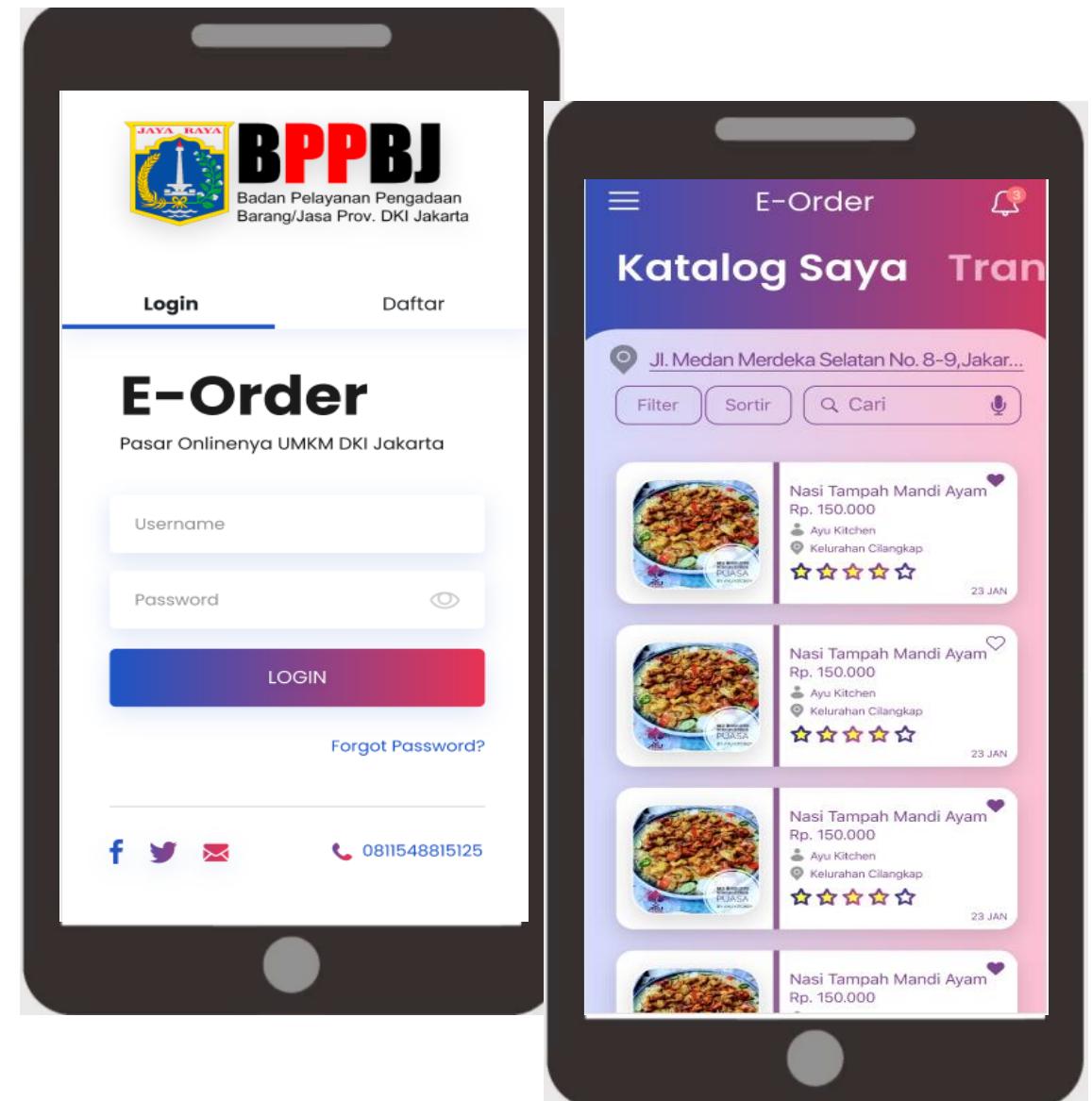
- Promo E Order BPPBJ (92x ditonton)
- Cara Pendaftaran UMKM PKT (9x ditonton)
- Cara Pendaftaran UMKM Non PKT (5x ditonton)
- Input Produk di e-order (3x ditonton)

Pengembangan E-Order 2021

Mengembangkan Sistem e-order untuk
BUMD

Melauching aplikasi e-order berbasis
android dan IOS

Untuk mempermudah penggunaan oleh
SKPD/UKPD dan UMKM Jakpreneur,



Kesimpulan E-order



Implementasi **Tujuan dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** adalah mendorong :

- Mengembangkan Usaha Mikro Kecil
- Menggunakan Produk Dalam Negeri
- Dan Membuka Lapangan Kerja Baru

K/L/PD Bisa
Memanfaatkan
e-order



Dengan Mengajukan
PKS ke Pemprov DKI
Jakarta

Terima Kasih

